

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagai pelaksana utama telah mengembangkan berbagai program seperti layanan pemeriksaan dini (VCT), edukasi masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Kanti Sehati. Namun demikian, keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan anggaran masih menjadi kendala yang signifikan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah pinggiran kota.

Koordinasi antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat forum seperti Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan masih bersifat parsial. Hal ini terlihat dari belum terintegrasinya data, lemahnya sistem pelaporan bersama, serta kurangnya keselarasan program antar instansi. Lemahnya koordinasi ini berdampak pada tumpang tindih kegiatan dan kurangnya pemantauan yang berkelanjutan di tingkat lapangan.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tingkat stigma terhadap Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) di masyarakat Kota Jambi masih cukup tinggi, yang menyebabkan rendahnya

kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dini. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya akses informasi dan pendidikan tentang HIV/AIDS di beberapa kelompok masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah dirancang dengan mengacu pada pedoman nasional, pelaksanaannya di tingkat lokal masih menghadapi banyak tantangan struktural dan kultural.

Adapun peran organisasi masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Lembaga seperti Yayasan Kanti Sehati telah aktif melakukan edukasi, pendampingan ODHA, dan menjangkau komunitas berisiko tinggi. Namun, peran ini belum sepenuhnya mendapat dukungan sistemik dari pemerintah daerah, terutama dalam hal pembiayaan dan penguatan kelembagaan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Jambi sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, kesiapan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan masyarakat. Untuk itu, pendekatan yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata dalam menekan penyebaran HIV dan AIDS di Kota Jambi.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Jambi.

1. Pertama, kepada Pemerintah Kota Jambi, diharapkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dengan membentuk forum komunikasi terpadu yang bersifat rutin dan strategis antara Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, organisasi masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat.
2. Kedua, Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan VCT, pengadaan tenaga kesehatan terlatih, serta penguatan fasilitas kesehatan di wilayah pinggiran. Pengembangan kapasitas SDM baik di lingkup pemerintah maupun masyarakat sipil juga sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat lebih efektif dan profesional.
3. Ketiga, penanggulangan HIV dan AIDS tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan, terutama untuk menghilangkan stigma terhadap ODHA. Edukasi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh adat, media lokal, dan institusi pendidikan.
4. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan fokus analisis yang terbatas pada implementasi kebijakan di tingkat Kota Jambi, serta hanya melibatkan beberapa informan dari instansi pemerintah, LSM, dan komunitas tertentu. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat: Mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan

kualitatif untuk melihat hubungan antara efektivitas kebijakan dan indikator epidemiologis seperti jumlah kasus baru, tingkat penggunaan layanan VCT, dan kepatuhan terapi ARV, guna menghasilkan data yang lebih objektif dan terukur.

Akhirnya, peneliti menyarankan agar evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS terus dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil program, tetapi juga meninjau proses pelaksanaannya, hambatan yang muncul, serta peluang perbaikan yang bisa dilakukan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang ada dapat terus disempurnakan dan benar-benar memberikan dampak positif dalam menekan angka kasus HIV dan AIDS di Kota Jambi.